

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Meidina Latifah

140810095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2018

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Meidina Latifah

140810095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 09 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Meidina Latifah

140810095

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Meidina Latifah

140810095

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 09 Agustus 2018

Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI

Pembimbing

ABSTRAK

Pada beberapa daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya dana yang sudah di alokasikan untuk pembangunan manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibutuhkan perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaruh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Batam. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Batam khususnya tahun 2010 – 2017. Pada penelitian ini, kesimpulan yang diambil adalah kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Batam tahun 2010 – 2017.

Kata Kunci: *Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia.*

ABSTRACT

In some areas Human Development Index (HDI) is an important thing to assess the success of funds that allocated for human development. Among the many choices, the most important choice to get a long life and healthy, to have knowledge, and to have access to the resources needed to live properly. To assess the Human Development Index (HDI), it is necessary to calculate the Special Allocation Fund and locally-generated revenue. The purpose of this study is to analyze how the effect of the special allocation fund and locally-generated revenue on the Human Development Index in Batam. This research uses qualitative data to be studied. The results of this study are Special Allocation Fund and locally-generated revenue are having an effect on the Human Development Index (HDI) in Batam, especially in 2010 – 2017. In this study, the conclusion is that the increase of special allocation fund and locally-generated revenue has an effect on the increase of Human Development Index in Batam City on 2010 – 2017.

Keyword: Special Allocation Fund, Locally-generated Revenue, Human Development Index

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd.;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan juga selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Bapak Handra Tipa, S.PdL., M.Ak selaku pembimbing Akademik yang juga sering membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Keluarga tercinta atas kasih sayang, doa dan semangat yang selalu diberikan;

7. Sahabat seperjuangan Maharani, Nurmardiyah, Selvi dan Dessy terima kasih atas semua kenangan dan kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya;
8. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, semoga nantinya menjadi orang yang sukses semuanya;
9. Riza Ahmad Zulkarnain, A.Md.T yang selalu memberikan semangat dan motivasi, terima kasih juga untuk segala doa-doa baiknya;
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memperlancar jalannya penelitian dari awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 09 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Dana Alokasi Khusus.....	7
2.2. Pendapatan Asli Daerah	12
2.3. Indeks Pembangunan Manusia.....	13
2.4. Penelitian Terdahulu	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	23
3.2. Operasional Variabel	25
3.3. Populasi dan Sampel	27

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5. Metode Analisis Data.....	29
3.5.1. Uji Statistik Deskriptif.....	29
3.5.2. Uji Asumsi Klasik Regresi	30
3.5.3. Uji Pengaruh.....	35
3.5.4. Uji Hipotesis.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.1.1. Uji Statistik Deskriptif.....	42
4.1.2. Uji Asumsi Klasik Regresi	45
4.1.3. Uji Pengaruh.....	51
4.1.4. Uji Hipotesis.....	53
4.2. Pembahasan	57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	60
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1.	Hasil Uji Normalitas.....	46
Gambar 4.2.	Histogram Uji Normalitas	48
Gambar 4.3.	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	51

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1.	Penghitungan DAK.....	12
Rumus 2.2.	Penghitungan PAD	13
Rumus 2.3.	Penghitungan IPM	16
Rumus 3.1.	Persamaan Regresi.....	36
Rumus 3.2.	Uji Determinasi R^2	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perkembangan DAK, PAD dan IPM Kota Batam.....	5
Tabel 1.2.	Batas Maksimum dan Minimum	15
Tabel 1.3.	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1.	Operasional Variabel.....	26
Tabel 3.2.	Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.2.	Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov.....	47
Tabel 4.3.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.4.	Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.5.	Hasil Uji Pengaruh	52
Tabel 4.6.	Hasil Uji t.....	54
Tabel 4.7.	Hasil Uji F.....	55
Tabel 4.8.	Hasil Uji R ²	56

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan kehidupan yang layak (ekonomi). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Gede Ferdi Williantara, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor (Putra & Ulupui, 2015).

Dalam beberapa daerah, Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya

dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peranan penting untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Setiap tahunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dana yang sudah dirancang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Alokasi Khusus dapat disebut dana infrastruktur karena juga merupakan belanja modal untuk membiayai pengadaan dan perbaikan untuk sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas (Putra & Ulupui, 2015).

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan

terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Putra & Ulupui, 2015).

Selain Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berperan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk menjalankan pemerintahan khususnya dalam bidang pembangunan manusia di suatu kota, tentunya sangat bertopang dengan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Semakin banyak pendapatan suatu daerah, maka semakin mampu juga daerah tersebut memenuhi dan membiayai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan (Jurnal, 2014).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan sesuai sasaran.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran dari perbandingan antara harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia juga digunakan untuk mengelompokkan Negara tersebut ke dalam kelompok Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang serta untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi kehidupan yaitu; kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perhitungan IPM diperoleh dari data yang menggambarkan ketiga dimensi, dimana kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah, sedangkan ekonomi diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok berdasarkan rata – rata besarnya pengeluaran per kapita (menurut BPS; 2008).

Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam tahun 2010 – 2017.

Tabel 1.1. Tabel Perkembangan DAK, PAD, dan IPM Kota Batam 2010-2017

TAHUN	BULAN	DAK	PAD	IPM
2010	Mar-10	35,950,550,000	54,763,045,438	73.07
	Jun-10	37,251,100,000	89,513,016,318	74.37
	Sep-10	38,551,650,000	124,262,987,198	75.68
	Dec-10	39,852,200,000	159,012,958,078	76.98
2011	Mar-11	39,679,625,000	207,397,566,597	77.19
	Jun-11	39,507,050,000	255,782,175,116	77.40
	Sep-11	39,334,475,000	304,166,783,635	77.61
	Dec-11	39,161,900,000	352,551,392,154	77.82
2012	Mar-12	38,965,332,500	367,708,277,643	77.96
	Jun-12	38,768,765,000	382,865,163,132	78.10
	Sep-12	38,572,197,500	398,022,048,620	78.25
	Dec-12	38,375,630,000	413,178,934,109	78.39
2013	Mar-13	43,640,252,500	461,469,313,329	78.46
	Jun-13	48,904,875,000	509,759,692,548	78.52
	Sep-13	54,169,497,500	558,050,071,768	78.59
	Dec-13	59,434,120,000	606,340,450,987	78.65
2014	Mar-14	58,747,447,500	649,741,547,603	78.77
	Jun-14	58,060,775,000	693,142,644,219	78.90
	Sep-14	57,374,102,500	736,543,740,835	79.02
	Dec-14	56,687,430,000	779,944,837,451	79.14
2015	Mar-15	64,331,165,000	794,137,092,674	79.19
	Jun-15	71,974,900,000	808,329,347,897	79.24
	Sep-15	79,618,635,000	822,521,603,119	79.29
	Dec-15	87,262,370,000	836,713,858,342	79.34
2016	Mar-16	89,461,336,173	862,785,393,757	79.45
	Jun-16	91,660,302,347	888,856,929,171	79.57
	Sep-16	93,859,268,520	914,928,464,586	79.68
	Dec-16	96,058,234,693	941,000,000,000	79.79
2017	Mar-17	90,013,169,221	949,281,000,000	79.91
	Jun-17	83,968,103,750	957,562,000,000	80.03
	Sep-17	77,923,038,278	965,843,000,000	80.14
	Dec-17	71,877,972,806	974,124,000,000	80.26

Sumber: BPS Kota Batam (bps.go.id), BPKAD Kota Batam, BPPRD Kota Batam

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 DAK mencapai angka Rp 39.852.200.000 dan PAD mencapai Rp 159.012.958.078,27,- dengan IPM sebesar 76,98%. Di tahun berikutnya DAK dan PAD naik menjadi Rp 325.551.392.753,69,- untuk PAD dan Rp 39.161.000.000 untuk DAK serta IPM otomatis meningkat menjadi 77,82% yang artinya angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,84% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2012 PAD di Kota Batam mengalami kenaikan menjadi Rp 413.178.934.109,31,- dan DAK nya menjadi Rp 38.375.630.000 serta IPM-nya juga naik dari yang semula 77,82% menjadi 78,39%. Kenaikan DAK dan PAD juga terjadi di tahun 2013, DAK nya menjadi Rp 59.434.120.000 dan PAD meningkat menjadi Rp 606.340.450.986,83,- serta IPM meningkat menjadi 78,65%. Di tahun 2014, PAD mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 779.944.837.450,53,- DAK menjadi Rp 56.687.430.000 dan IPM naik menjadi 79,14%. Di tahun 2015, PAD naik lagi menjadi Rp 836.713.858.341,88,- dan Rp 87.262.370.000 serta IPM juga naik menjadi 79,34%. Untuk tahun 2016, kenaikan pada DAK dan PAD juga mempengaruhi IPM. DAK naik menjadi Rp 96.058.234.693,- PAD naik menjadi Rp 882.266.000.000 dan IPM menjadi 79,79%. Di tahun terakhir penelitian, yaitu tahun 2017 DAK nya sebesar Rp 71.877.972.806,- PAD nya sebesar Rp 974.124.000.000 serta IPM nya menjadi 74,45%.

Kenaikan PAD di Kota Batam meningkat dikarenakan semakin banyaknya pembangunan hotel dan restaurant yg awalnya bertujuan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pariwisata Kota Batam yang tentunya berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Batam. Peningkatan IPM di Kota Batam salah

satunya dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data dari website BPS. Di tahun 2016, Angka Harapan Hidup kota Batam naik menjadi 73,09%.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan setiap tahunnya (tabel terlampir), hal ini seharusnya dibarengi dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia karena daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk menaikkan sector – sector yang mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan dana yang dialokasikan khusus untuk pembangunan manusia berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu factor meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
3. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena mereka masih menggantungkan adanya dana dari Pemerintah Pusat.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari masalah yang meluas, maka peneliti membatasi permasalahan dari latar belakang masalah sebelumnya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada hal – hal sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 – 2017 di Kota Batam.
2. Variabel yang digunakan untuk memprediksi Indeks Pembangunan Manusia adalah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam tahun 2010 – 2017.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam tahun 2010 – 2017?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 – 2017 di Kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam pada tahun 2010 – 2017?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam pada tahun 2010 – 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam pada tahun 2010 – 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam pada tahun 2010 – 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer;
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Setyowati dan Suparwati (2012) melakukan penelitian Indeks Pembangunan Manusia dengan variabel independennya pertumbuhan ekonomi.

DAU, DAK dan PAD serta Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitiannya adalah DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif. Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah kabupaten dan kota sedang memaksimalkan otonomi daerah di Jawa Tengah sehingga dana perimbangan dan pendapatan asli daerah bisa menjelaskan pembangunan manusia suatu daerah di Jawa Tengah.

Menurut Subekan (2012: 88) dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan/pertanian, prasarana pemerintahan daerah dan lingkungan hidup.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara spesifik: (BKKBN, 2015) :

1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan.
2. Membantu daerah – daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah

dengan lebih memperhatikan daerah tertinggal, perbatasan dan pesisir/kepulauan.

3. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan tepat waktu.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan.
5. Meningkatkan akurasi data data teknis dan menajamkan indicator pengalokasian DAK.

Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAK:

$$\text{DAK} = \frac{\text{Total Realisasi DAK} \times 100\%}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

Rumus 2.1.
Penghitungan Dana
Alokasi Khusus

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2012: 101). Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dari PAD yang merupakan rasio digunakan untuk mengukur hubungan antara besarnya hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan besarnya Pendapatan Daerah. Pengukuran PAD dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Marizka, Reza (2013). Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur PAD:

$\text{PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Rumus 2.2. Perhitungan PAD

2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. *HDI* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan setiap daerah yang dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) (Ariza, 2016). Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standart kehidupan masyarakat.

Dalam melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), setiap komponen harus dihitung indeksnya. Komponen tersebut adalah:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak dkk, 2014). Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini (BPS, 2008:39):

1. Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
2. Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).
3. Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$).
4. Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM > 80$).

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Batas Maksimum dan Minimum IPM

No	Komponen IPM	Maks	Min	Keterangan
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2	Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3	Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)	100	0	
4	Daya Beli (Rupiah PPP)	732.720 ^a	300.000 (1996)	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan

Sumber: bps.go.id

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

- 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir
- 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)
- 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP - *Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah).
- 4) IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$IPM = \frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{3}$	Rumus 2.3. Penghitungan IPM
-------------------------------------	------------------------------------

Keterangan:

X_1 = Angka Harapan Hidup (AHH)

X_2 = Tingkat Pendidikan

X_3 = Tingkat Kehidupan yang Layak

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diteliti oleh Andreas Marzel Pelealu di tahun 2013 dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012 dengan variable Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja modal yang hasilnya adalah hasil regresi antar variable bebas (DAK, PAD), dan variable terikat (belanja modal) menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS, Sulut tahun 2003 – 2012. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado. Dana Alokasi Khusus merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado, sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan daerah pemerintah Kota Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi di tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” mendapatkan hasil bahwa PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negative terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dampak untuk peningkatan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diharapkan Belanja Langsung diprioritaskan pada sektor Listrik, Air Minum, dan

Bangunan, sektor komunikasi tidak berdampak besar pada sektor-sektor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia” yang diteliti oleh Gede Ferdi Wiliantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih di tahun 2016 dengan variable PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan IPM menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH tidak mempengaruhi IPM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DBH dalam membiayai Belanja Modal tidak mempengaruhi capaian IPM. Namun DAK menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif pada IPM. Hal tersebut mengindikasikan semakin besar DAK dalam membiayai Belanja Modal maka akan dapat menurunkan capaian IPM.

Penelitian lain yang dilakukan di tahun 2013 oleh Hasan Basri, Syaparuddin dan Junaidi berjudul “Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” dengan variable Pemetaan PAD, Kinerja keuangan daerah, *Growth*, *Share* dan *Elasticity* menyimpulkan bahwa komposisi PAD terbesar berasal dari penerimaan lain – lain yang sah yaitu 42,32%, komposisi terbesar dari APBD bersumber dari dana perimbangan sebesar 83,49%. Kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang memiliki status kemampuan keuangan tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Berdasarkan pertumbuhan PAD dan kontribusinya terhadap APBD, secara umum Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun kinerja PAD lebih baik jika dibanding

Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun memiliki status kemampuan keuangan tinggi, sedangkan Kabupaten Bungo, Muaro Jambi dan Tebo memiliki status kemampuan keuangan rendah. Dari peta kemampuan keuangan daerah, hanya Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo yang memiliki tingkat kemandirian diatas rata – rata dan tingkat ketergantungan dibawah rata – rata daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui di tahun 2017 yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia” menunjukkan hasil bahwa PAD secara konsisten mampu meningkatkan IPM sesuai dengan hasil yang diperoleh. DAK mampu meningkatkan IPM. Dengan adanya peningkatan PAD dan DAK suatu daerah, maka IPM akan meningkat. Penelitian ini menggunakan PAD, DAU, DAK dan IPM sebagai variable.

Pada tahun 2016 Rudin M, Maria Lea FrensyBakarbessy, Andi Matulada Amir, Vita Yanti Fattah, dan Suardi dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Local Revenue and Local Expense on Economic Growth (Study in The Regencies and Cities of North Moluccas Province Within 2006-2015)* menyimpulkan bahwa pendapatan daerah, dana alokasi umum, biaya karyawan, dan biaya barang dan jasa berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

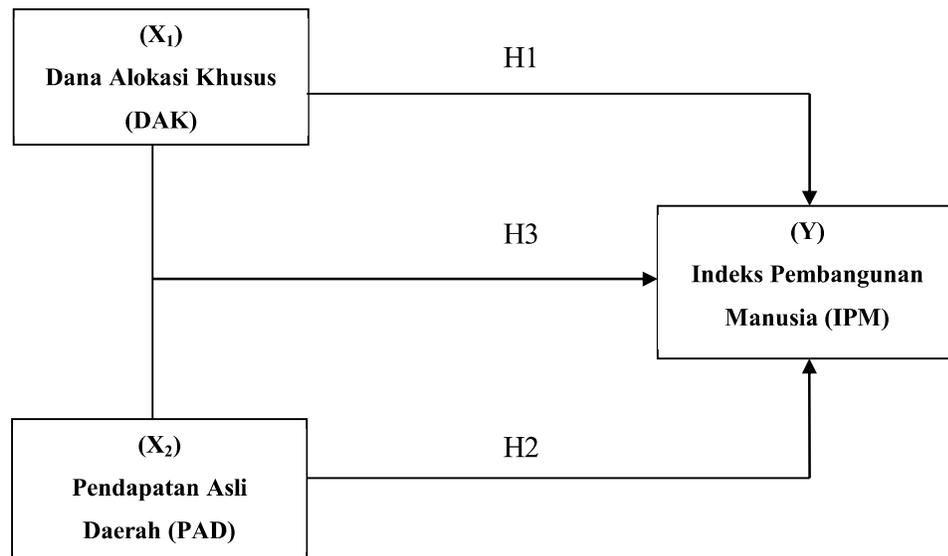
Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Andreas Marzel Pelealu (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado tahun 2003 – 2012	Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Putu Gde Mahendra Putra, I Gusti Ketut Agung Ulupui (2015)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	PAD, DAU, DAK dan IPM	PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap IPM.
Andri Devita, Arman Delis, dan Junaidi (2014)	Pengaruh PAD, DAK dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jambi	PAD, DAK, Jumlah Penduduk, Belanja Modal	PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Jambi.
Rudin M, Maria Lea FrensyBakarbesy, Andi Matulada Amir, Vita Yanti Fattah, dan Suardi (2016)	<i>The Effect of Local Revenue and Local Expense on Economic Growth (Study in The Regencies and Cities of North Moluccas Province Within 2006-2015)</i>	<i>Local Revenue and Local Expense on Economic Growth</i>	Pendapatan daerah, DAU, biaya karyawan, dan biaya barang dan jasa berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Gede Ferdi Wiliantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks	PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil dan IPM	PAD, DAU, dan DBH tidak mempengaruhi IPM.

	Pembangunan Manusia		
Hasan Basri, Syaparuddin dan Junaidi (2013)	Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Pemetaan PAD, Kinerja keuangan daerah, <i>Growth, Share</i> dan <i>Elasticity</i>	Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo yang memiliki tingkat kemandirian diatas rata – rata dan tingkat ketergantungan dibawah rata – rata daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang berisi fakta-fakta hasil observasi. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan keterkaitan antara variable satu dengan variable lainnya dalam penelitian. Variable-variabel tersebut kemudian dijelaskan lagi secara rinci dan nyata sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan suatu kerangka berpikir yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Kota Batam. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan – kesimpulan teoritis – teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya (Kuswanto, 2012). Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
- H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.
- H₃: Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Untuk mencapai target yang maksimal dalam kegiatan penelitian maka dilakukan beberapa tahapan sistematis dan terencana yang terdiri atas tahapan persiapan yang dilakukan dengan membuat proposal penelitian untuk di meneliti dan mengambil data di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.

Desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Moh. Nazir, 2011: 84). Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian merupakan pengumpulan dan analisis data saja. Dalam pengertiannya yang luas, desain penelitian mencakup proses-proses berikut:

1. Menetapkan permasalahan

Dalam penelitian ini permasalahan terletak pada pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam periode 2010 – 2017.

2. Mengidentifikasi Masalah

Dalam penelitian ini diidentifikasi masalah yang terjadi adalah pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam

3. Menetapkan rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh DAK dan PAD secara simultan terhadap IPM di Kota Batam periode 2010 – 2017.
4. Menetapkan tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DAK dan PAD terhadap IPM di Kota Batam periode 2010 – 2017.
5. Menetapkan hipotesis penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu dan dukungan teori, peneliti menetapkan hipotesa dalam penelitian ini adalah DAK dan PAD secara simultan terhadap IPM di Kota Batam periode 2010 – 2017.
6. Pengujian hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah DAK dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Kota Batam periode 2010 – 2017.
7. Metode penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan metode penelitian kuantitatif.
8. Menyusun *instrument* penelitian
Instrument penelitian yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data didapat dari laporan BPPRD, BPKAD, dan BPS Kota Batam.
9. Kesimpulan
Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Penelitian deskriptif adalah

studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dalam memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

3.2. Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel merupakan segala sesuatu apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

3.2.1. Variabel Independen

Variabel independen (X) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga sering disebut variabel stimulus. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013: 39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus sebagai X1 dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam sebagai X2.

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia di Kota Batam.

Operasional Variabel DAK (X1), PAD (X2), dan IPM (Y)

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Independen			
DAK (X1)	Dana yang berasal dari APBN untuk disalurkan kepada daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus di daerah tersebut.	Transfer dari pemerintah, Dana khusus	Rasio
PAD (X2)	Dana yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.	Berasal dari pajak, retibusi daerah, laba dari BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.	Rasio
Dependen			
IPM (Y)	Pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia.	Angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah.	Rasio

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai kelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah Kota Batam.

3.3.2. Sampel

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang mempunyai karakteristik yang relative sama dan dianggap dapat mewakili populasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus Kota Batam, Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam sebuah penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono (213: 2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatlan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasi data sekunder yang diperlukan berupa laporan keuangan yang diperoleh langsung dari BPKAD, BPPRD dan BPS Kota Batam serta studi kepustakaan untuk mencari referensi dari buku – buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal – jurnal ilmiah yang sejalan dengan penelitian.

Menurut Sarwono (2012: 32) data sekunder adalah data yang sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukannya. Sumber data ini lebih banyak digunakan sebagai data yang sudah diolah sehingga sudah siap untuk digunakan. Data dalam bentuk statistic biasanya tersedia di kantor – kantor pemerintahan, perusahaan swasta, atau badan yang berhubungan dengan penggunaan data.

Pengumpulan data adalah aktifitas yang menggunakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik dokumen ini untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi, maupun kelembagaan. Data pada dokumen ini juga berasal dari data laporan keuangan.

3.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka – angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi keuangan yang berhubungan dengann variabel penelitian, yaitu:

- a. Informasi mengenai DAK
- b. Informasi mengenai PAD
- c. Informasi mengenai IPM

3.4.2. Sumber Data

a. Data Internal

Data internal merupakan data yang didapat dari suatu organisasi. Contohnya seperti data laporan perusahaan.

b. Data Eksternal

Data eksternal merupakan data yang didapat dari luar suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya seperti data informasi dari penelitian referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang paling kritis sebagai bahan pembuktian semua asumsi dan hipotesis yang di uji. Data akan menjadi informasi yang mempunyai arti bila analisis penyajian dapat digunakan pada saat pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dibantu dengan program computer yaitu SPSS versi 21.

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Wibowo, (2012: 24) statistic deksriptif adalah statistic yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek – aspek penting berkaitan dengan data tersebut. Biasanya mendeskripsikan hal – hal sebagai berikut dari suatu data:

1. Mean
2. Median

3. Modus
4. Range
5. Varian
6. Frekuensi
7. Nilai maksimum
8. Nilai minimum
9. Standar deviasi

Statistic deskriptif ini biasanya meliputi kegiatan berupa penyajian data yang berupa grafik dan tabel. Dan melakukan kegiatan peringkasan data dan penjelasan data, berupa letak data, bentuk data dan variasi data.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik Regresi

Pengujian asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar – benar bebas dari adanya gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas dan gejala autokorelasi. Model regresi dapat dijadikan alat estimasi jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat heterokedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas. Jika terdapat heterokedastisitas, maka varian tidak boleh konstan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *standart error*. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian – pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistic parametric memiliki asumsi normalitas sebaran. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji (t-tes misalnya) dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal.

Model yang baik adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian koefisien regresi.

Menurut Santoso (2007: 154) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka populasi tidak terdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS. Berikut ini merupakan dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Selain itu uji normalitas juga digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji *Kolmogrov-Smirnov*. Berdasarkan sampel ini diadakan uji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

Kolmogrov – Smirnov

Uji *Kolmogrov-Smirnov* adalah pengujian normalitas yang banyak terutama setelah adanya banyak program statistic beredar.

Konsep dasar dari uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogrov – Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi diatas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogrov – Smirnov adalah bahwa jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Di dalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, maksudnya tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna antar variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan *tool* uji yang disebut dengan *Varian Inflation Factor* (VIF), yaitu dengan melihat nilai masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Menurut Wibowo (2012: 87) jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013: 110). Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic *Durbin-Watson*. *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi

dan tidak ada variabel diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

- H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)
- H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Menurut Santoso (2012: 242) untuk mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi, ada pertimbangan kriteria pengujian *Durbin – Watson* yang harus dipatuhi, antara lain:

- a. Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif.
- b. Bila angka DW -2 sampai dengan $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Bila angka DW $> +2$ berarti ada autokorelasi yang negative.

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Menurut Ghozali (2013: 139) untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat menggunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Kemudian deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y

yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah diolah. Dasar dari analisis heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu (seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3. Uji Pengaruh

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dimana pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan yang dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas yang jumlahnya lebih dari satu buah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel – variabel yang memiliki; hubungan-pengaruh, dengan, dan terhadap, variabel yang dijelaskan atau variabel dependen.

Model regresi linier berganda dengan sendirinya menyatakan suatu bentuk hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya (Wibowo 2012: 126). Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependennya jika suatu kondisi terjadi. Kondisi tersebut adalah naik atau turunnya

nilai masing – masing variabel independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi.

Untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen (Dana alokasi khusus dan Pendapatan Asli Daerah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Rumus 3.1. Persamaan regresi

Keterangan:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia
 a : Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2 \dots X_n = 0$)
 b_1 : Koefisien Dana Alokasi Khusus
 b_2 : Koefisien Pendapatan Asli Daerah
 X_1 : Dana Alokasi Khusus
 X_2 : Pendapatan Asli Daerah
 e : error

Besarnya konstanta dalam a dan besarnya koefisien regresi masing – masing variabel independen yang ditunjukkan X_1 dan X_2 . Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji t (secara parsial)

Uji hipotesis parsial digunakan untuk menguji hubungan antara masing – masing variabel bebas terhadap variabel tetap secara parsial atau per variabel dengan uji t (A. Nugroho, 2011:100-101). Tahap pengujian yang dilakukan, yaitu:

1. Menentukan rumusan hipotesis

H_0 = Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_a = Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Menentukan *level of significant*, dengan $\alpha = 0,05$.

3. Tingkat pengujian :

Jika $-t_{tabel} > t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Menentukan nilai t_{hitung} .
5. Menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} yang didapatkan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai $df = N - k$.
6. Menarik kesimpulan.

3.5.4.2 Uji F (Secara simultan)

(Nugroho, 2011: 99-100) berpendapat bahwa uji hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel bebas memiliki

hubungan yang signifikan dengan variabel terikat dengan uji F. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Menentukan rumusan hipotesis

H_0 = Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_a = Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Menentukan *level of significant*, dengan $\alpha = 0,05$.

3. Tingkat pengujian :

Jika $- F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $- F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Menentukan nilai F_{hitung} .
5. Menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yang didapatkan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai $df(N1) = k-1$ pembilang = k dan dk penyebut $df(N2) = N - k$ dimana k = variabel bebas.
6. Menarik kesimpulan.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Analisis determinasi digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi secara serentak atau bersama – sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas (Wibowo, 2012: 135).

Menurut Ghozali (2013: 97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang terbaik dalam analisis regresi dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel independen akan mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab – sebab lain diluar model. Nilai koefisien R^2 mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 mendekati 1, semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan pengertian diatas, maka koefisien determinasi merupakan bagian dari keragaman total dari variabel tak independen dihitung dengan koefisien determinasi dengan asumsi dasar factor-faktor lain diluar variabel dianggap tetap atau konstan. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan rumus:

$$R^2 = (r_{yx1})^2 + (r_{yx2})^2 + 2(r_{yx1})(r_{yx2})(r_{x1x2})$$

**Rumus 3.2. Uji
Determinasi R^2**

Keterangan:

R^2 : Koefisien Determinasi

ry_{x_1} : Korelasi variabel X_1 dengan y

ry_x : Korelasi variabel x_2 dengan y

rx_1x_2 : Korelasi variabel x_1 dengan variabel x_2

Jika nilai D mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel independen dalam model regresi tersebut menerangkan variasi variabel independennya.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, dan Badan Pusat Statistik Kota Batam.

3.6.3 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian ini berlangsung selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Maret 2018 hingga bulan Agustus 2018. Berikut ini tabel jadwal penelitian dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan penelitian ini:

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Mar-18				Apr-18				Mei-18				Jun-18				Jul-18				Agt-18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																					
2	Pengajuan Surat Izin Penelitian				■																				
3	Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Analisis Data													■	■	■	■								
5	Penyusunan Laporan													■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Pengumpulan Skripsi																					■			